

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, LEVERAGE, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING DAN OPINI AUDIT PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA BAGIAN TENGAH**

**Muhamad Hanafi<sup>1</sup> Ikhwan Wadi<sup>2</sup>**

Universitas Gunung Rinjani<sup>1</sup> Universitas Gunung Rinjani<sup>2</sup>

email : kandanafi16@gmail.com

**ABSTRAK**

Analisa ini tujuannya untuk menganalisa dan memberi kepastian secara nyata tentang dampak ukurannya dalam pemerintah daerah, *leverage*, kapabilitas financial terhadap *internet financial reporting* dan opini audit dalam pemerintahan daerah di Indonesia bagian tengah. Populasi di penelitian ini berjumlah 88 kabupaten/kota. Sedangkan sampel yang terpilih didalam analisis adalah 83 kabupaten/kota di Indonesia bagian tengah melalui tehnik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan analisis statistic deskriptif dan analisis Parsial Least Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah(X1), t hitung = 0,611 < t tabel 1,99, *Leverage*(X2), t hitung = 0,408 < t tabel 1,99, Kinerja Keuangan(X3), t hitung = 1,542 < t tabel 1,99 maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran pemerintah daerah, *Leverage* dan kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *internet financial reporting*. Ukuran pemerintah daerah(X4), t hitung = 0,831 < t tabel 1,99, *Leverage* (X5), t hitung = 1,011 < t tabel 1,99 maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit. Sedangkan Kinerja Keuangan(X6), t hitung = 3,010 > t tabel 1,99 maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kinerja Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit. Adapun untuk *Internet financial reporting*(Y1), t hitung = 0,471 < t tabel 1,99 maka dapat disimpulkan bahwa *Internet financial reporting* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit.

Kata kunci : Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Kinerja keuangan, *Internet Financial Reporting*, Opini Audit.

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dan diubah menjadi Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah, dalam artian kewenangan untuk lebih leluasa dalam mobilisasi sumber dana, arah tujuan dan target penggunaan anggaran daerah. Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pada kenyataannya tidak semua pemerintah daerah telah memiliki website resmi yang aktif baik yang dapat dilihat dari sisi muatan maupun berita, meskipun telah ada aturan pemerintah yang mengatur tentang website pemerintah daerah. Selain itu, tidak semua pemerintah daerah yang mengupload laporan keuangannya ke masing-masing website resmi yang telah dimiliki pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh temuan Trisnawati serta Achmad (2014) yang menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tiap tahunnya, sehingga menyebabkan perbedaan kualitas dan informasi keuangan antar pemerintah daerah. Adapun Tabel Penerapan *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah Pada Indonesia Bagian Tengah 2019

No.	Pemerintah Daerah	Daerah Otonom	Tidak Memiliki Website	Website Tidak Bisa Diakses
1	Kabupaten	77	5	0
2	Kota	11	0	0
	<b>Jumlah</b>	88	5	0
	<b>Persentase</b>	94,32%	5,68%	0%

Sumber : data diolah, 2020

Hasil observasi yang dilakukan pada bulan Juni 2020 (Tabel 1.1) menunjukkan bahwa dari 88 pemerintah kabupaten dan kota pada indonesia bagian tengah hanya 5 pemerintah kabupaten yang belum memiliki *website* atau dengan kata lain 77 pemerintah kabupaten dan 11 kota telah memiliki *website*, hal ini berarti telah terjadi peningkatan penerapan website resmi pemerintah daerah yang dikenal dengan *Internet Financial Reporting* di Indonesia bagian tengah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penggunaan *website* oleh pemerintah daerah masih belum maksimal sebagaimana yang ditunjukkan oleh Puspita dan Martani (2012) dimana pemerintah daerah mengungkapkan informasi pada situs resminya pada tingkat 44,84 persen (total pengungkapan), 47 persen (pengungkapan konten), dan 42,61 persen (presentasi pengungkapan). Penelitian Agustin (2014) tentang publikasi dokumen pengelolaan anggaran pada *website* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat juga membuktikan bahwa masih banyak pemerintah daerah khususnya di provinsi Sumatera Barat masih kurang di dalam mengungkapkan laporan keuangan yang transparansi.

Fakta-fakta tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan *website* pemerintah daerah belum maksimal dan terdapat keberagaman tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah. Fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan IFR pada *website* pemerintah.

Pemerintah daerah yang besar umumnya memiliki jumlah kekayaan yang besar pula sehingga pengawasan terhadap kegiatan pemerintah semakin ketat. Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah sebagai *steward* akan berupaya untuk mewujudkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi keuangan dengan pihak eksternal dengan mempublikasikan laporan keuangannya. Adapun Tabel Total Aset Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2019

No.	Total Aset (dalam Miliaran Rupiah)	Jumlah Kabupaten/Kota	Persentase
1	451 – 4.450	79	89,77%
2	4.451 – 8.450	5	5,68%
3	8.451 – 12.450	3	3,40%
4	12.451 – 16.450	1	1,13%
5	16.451 – 20.450	0	0%
6	20.451 – 24.450	0	0%
7	24.451 – 28.450	0	0%
8	28.451 – 32.450	0	0%
9	32.451 – 36.450	0	0%
10	36.451 – 40.450	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>88</b>	<b>100 %</b>

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, 2019

Ukuran pemerintah daerah dapat digambarkan dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa 87,80 persen pemerintah kabupaten/kota di Indonesia memiliki total aset kurang dari Rp4.450.000.000.000,-. Sedangkan beberapa pemerintah kabupaten/kota memiliki total aset yang sangat besar hingga mencapai Rp 40.450.000.000.000,-. Hal ini berarti pemerintah kabupaten/kota di Indonesia memiliki ukuran yang beragam. Perbedaan ukuran pemerintah daerah dapat menyebabkan perbedaan pada tingkat pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah pada *website* resminya.

Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK Tahun 2018, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 yang terdiri dari 34 LKPD provinsi, 415 LKPD kabupaten, dan 93 LKPD kota. Pada Tabel dibawah ini disajikan opini audit atas LKPD Tahun 2019.

No	Pemerintah Daerah	Daerah Otonom	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Tidak Wajar (TW)	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
1	Kabupaten	77	66	11	0	0
2	Kota	11	11	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	88	77	11		0
	<b>Persentase</b>	100%	85,8%	14,2%	0%	0%

Sumber : IHPS BPK Semester I, 2019

BPK mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 77 (85,8persen) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 11 (14,2 persen) LKPD, dan opini. Jumlah capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang

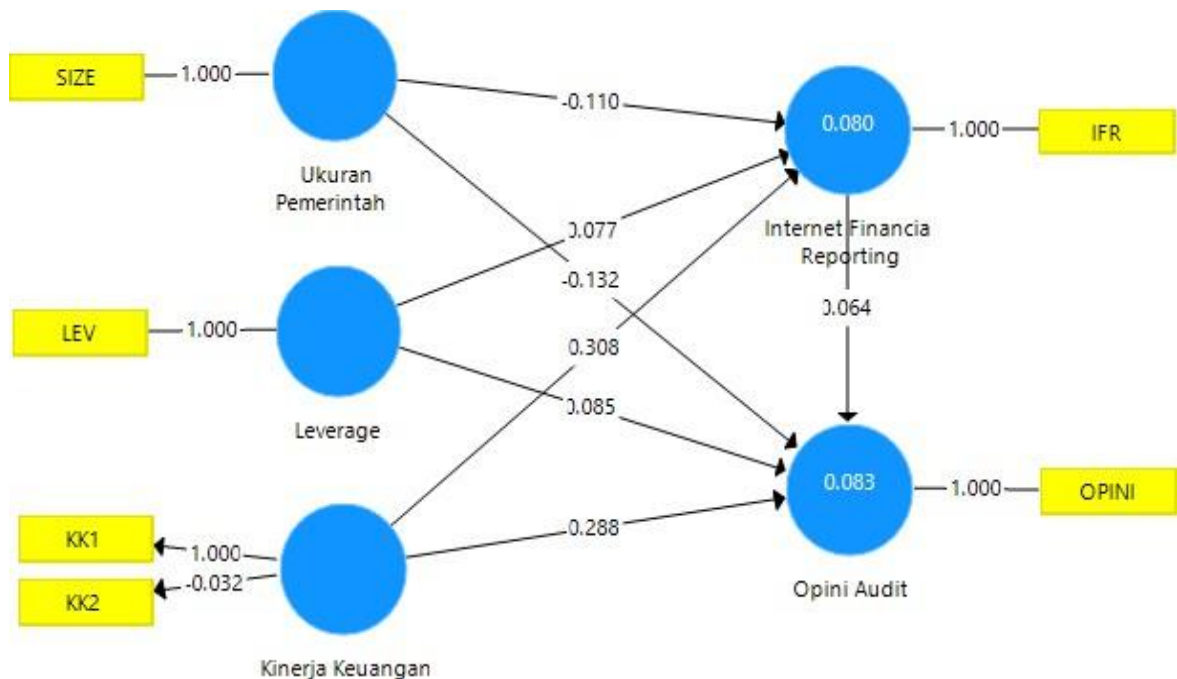
ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dimana masing-masing sebesar 60 persen dan 65 persen di tahun 2019.

Berdasarkan capaian-capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintah daerah kabupaten/kota sudah semakin baik. Penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditunjukkan melalui capaian opini WTP akan semakin mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan transparansi dengan mengungkapkan informasi financial di *website* resmi pemerintah daerah.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel karena data penelitian berupa angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sugiono,2015:13). Berdasarkan atas tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian yang melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitian ini ada variabel independen dan dependen (Sugiono,2015:19) Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan ukuran pemerintah daerah, *leverage* dan kinerja keuangan dengan *Internet Financial Reporting* dan opini audit pada pemerintah daerah di Indonesia.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**



**Gambar4.2 Hasil PLSAlgorithmAwal**

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa nilai *loading factor* atas indikator KK1 terhadap konstruk kinerja keuangan memiliki nilai lebih besar dari 0,6 yaitu 1.000. Hal ini berarti indikator KK1 dapat mengukur konstruk kinerja keuangan dalam penelitian ini. Sebaliknya, nilai *loading factor* indikator KK2 tidak memenuhi persyaratan validitas konstruk kinerja keuangan

karena memiliki nilai lebih kecil dari 0,6 yaitu 0,032. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator KK2 tidak berkorelasi terhadap konstruk kinerja keuangan sehingga indikator ini didrop dari model.

**Tabel 4.11 Hasil Analisis Koefisien Jalur (*Path Coefsiens*)**

Variabel	Sampel Asli (O)	T Statistik	P Values	Keterangan	Keputusan
KK -> IFR	0.289	1.542	0.124	Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak
KK -> Opini	0.308	3.010	0.003	Signifikan	Hipotesis Diterima
Lev-> IFR	0.072	0.408	0.684	Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak
Lev -> Opini	0.090	1.011	0.312	Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak
Opini -> IFR	0.064	0.741	0.459	Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak
SIZE -> IFR	-0.101	0.611	0.541	Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak
SIZE -> Opini	-0.139	0.831	0.406	Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Diolah 2020

Hipotesis pertama menyebutkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, tidak memberikan dampak terhadap *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah di Indonesia bagian tengah. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t-statistik untuk pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting* adalah 0,611. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai t tabel pada level signifikansi 5 persen yaitu 1,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. P value untuk pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,541 lebih besar dibandingkan nilai alpha 0,05. Hal ini berarti hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting* tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien parameter ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar -0,101 dengan arah negatif. Artinya semakin besar ukuran pemerintah daerah tidak akan memberikan dampak terhadap *Internet Financial Reporting*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *stewardship theory* dimana pemerintah daerah sebagai *steward* lebih termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap masyarakat sesuai dengan harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Pemerintah daerah yang besar memiliki total aset yang besar pula sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap segala kegiatan pemerintahan. Untuk meminimalisir asimetri informasi keuangan dengan pihak eksternal, pemerintah daerah dapat mempublikasikan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Publikasi informasi keuangan melalui internet juga merupakan sinyal positif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Artinya hasil penelitian ini juga mendukung *signalling theory*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Garcia (2010), Medina (2012), Trisnawati (2014) dan Diani (2016) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Ukuran pemerintah daerah mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada *website* resmi pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah digambarkan melalui jumlah total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang besar akan memiliki total aset yang besar pula. Jumlah total aset yang besar memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi pada sarana dan prasarana terkait transparansi seperti melakukan pengembangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Melalui *website*, pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya akan transparansi kepada masyarakat dengan lebih cepat dan hemat biaya.

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa semakin tinggi *leverage*, tidak memberikan dampak pada *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah di Indonesia bagian tengah. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t-statistik untuk pengaruh *leverage* terhadap *Internet Financial Reporting* adalah 0,408. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai t tabel pada level signifikansi 5 persen yaitu 1,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. P value untuk pengaruh *leverage* terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,684 lebih besar dibandingkan nilai alpha 0,05. Hal ini berarti hubungan antara *leverage* terhadap *Internet Financial Reporting* tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien parameter *leverage* terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,072 dengan arah positif. Artinya semakin besar *leverage* maka akan *Internet Financial Reporting* semakin kecil.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Garcia (2010), Sutaryo *et al.*, (2013) serta Trisnawati dan Achmad (2014) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Prabowo (2011), Prabowo (2016), Nosihana dan Yaya (2016) dan Diani (2016) yang menemukan bahwa *Internet Financial Reporting* tidak dipengaruhi oleh *leverage*.

*Leverage* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penelitian Laswad *et al.*, (2005) menemukan bahwa *Internet Financial Reporting* merupakan sarana yang efektif dalam membantu pemerintah daerah di New Zealand untuk menyediakan informasi terkait penggunaan dana dan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengembalikan dana yang dipinjam kepada kreditor.

*Leverage* dalam penelitian ini diukur melalui perbandingan total kewajiban terhadap total aset yang dimiliki pemerintah daerah. *Leverage* yang tinggi akan menuntut pemerintah untuk menyediakan media pengawasan bagi kreditor untuk mengawasi penggunaan dana yang dipinjam serta memonitor kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang. *Internet Financial Reporting* merupakan media pengawasan yang tepat yang dapat disediakan oleh pemerintah bagi kreditor karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta hemat biaya. Hal ini tidak sejalan dengan konsep *stewardship theory* dan *signalling theory* dimana pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan transparansi informasi keuangan melalui *website* pemerintah daerah agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Pengungkapan informasi keuangan melalui *website* juga merupakan sinyal positif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dengan baik dan bertanggungjawab.

Hipotesis ketiga menyebutkan bahwa semakin baik kinerja keuangan, tidak akan memberikan dampak pada *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah di Indonesia bagian tengah. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t-statistik untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* adalah 1,542. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai t tabel pada level signifikansi 5 persen yaitu 1,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. P value untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,124 lebih besar dibandingkan nilai alpha 0,05. Hal ini berarti hubungan antara kinerja keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien parameter kinerja keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,289 dengan arah positif. Artinya semakin baik kinerja keuangan tidak akan memberikan dampak pada *Internet Financial Reporting*.

Konsep *signalling theory* menggambarkan bahwa pemerintah akan berusaha memberikan sinyal-sinyal positif kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Sinyal positif ini bisa berupa pengungkapan informasi keuangan yang disajikan secara lengkap melalui *website* resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep *signalling theory* dimana pemerintah daerah dengan kinerja keuangan baik cenderung melakukan *Internet Financial Reporting*. Hasil penelitian ini juga mendukung *stewardship theory*. Pemerintah daerah lebih terfokus pada tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan informasi keuangan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Hiola *et al.*, (2015) yang menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka pemerintah daerah juga akan semakin patuh dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website* resminya. Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Puspita dan Martani (2012) yang menemukan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website*. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang tinggi akan mengungkapkan informasi keuangan di *website* resminya. Pemerintah Kota Denpasar merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian di atas rata-rata yaitu sebesar 49,01 persen dan memiliki tingkat pengungkapan sebesar 75 persen atau dengan kata lain mengungkapkan 9 (sembilan) item dari 12 (dua belas) item transparansi yang ditetapkan. Sebaliknya, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Puncak Jaya memiliki kinerja keuangan, dalam hal ini rasio kemandirian, pada kategori rendah sekali dengan nilai sebesar 0,46 persen dan 0,86 persen hanya memiliki tingkat pengungkapan sebesar 0 (nol) persen dimana Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Puncak Jaya tidak mengungkapkan satupun item transparansi sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Hipotesis keempat menyebutkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, tidak memberikan dampak terhadap opini audit pada Pemerintah Daerah di Indonesia bagian tengah. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t-statistik untuk pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit adalah 0,831. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai t tabel pada level signifikansi 5 persen yaitu 1,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. P value untuk pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit sebesar 0,406 lebih besar dibandingkan nilai alpha 0,05. Hal ini berarti hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien parameter ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar -0,139 dengan arah negatif. Artinya semakin besar ukuran pemerintah daerah tidak akan memberikan dampak terhadap opini audit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *signalling theory* yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mengirimkan berbagai sinyal kepada masyarakat sebagai dasar penilaian apakah amanat yang diberikan kepada pemerintah telah dijalankan dengan sungguh-sungguh (Evans, John H and Patton, James M. (1987) dan Prabowo (2016). Opini audit yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat masyarakat dengan baik pula yaitu dengan menyajikan laporan keuangan secara wajar. Akan tetapi opini audit tidak mampu memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan *Internet Financial Reporting*. Hasil penelitian juga tidak mendukung konsep *stewardship theory* dimana pemerintah daerah sebagai *steward* seharusnya berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar memiliki total aset yang besar pula. Total aset yang besar ini dapat menjadi kendala pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Semakin besar aset yang dimiliki pemerintah daerah maka akan semakin sulit pengelolaannya seperti pencatatan atas aset – aset daerah. Hal ini dapat menjadi penyebab pemerintah daerah enggan mengungkapkan informasi keuangan pada website resminya. Opini audit WTP mengindikasikan pemerintah daerah telah menyelenggarakan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan SAK serta memiliki Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang baik. Namun, WTP juga tidak selalu mengindikasikan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah telah benar – benar baik sehingga opini audit tidak dapat memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan *Internet Financial Reporting*.

Hipotesis keempat menyebutkan bahwa semakin tinggi *leverage*, tidak memberikan dampak pada opini audit pada Pemerintah Daerah di Indonesia bagian tengah. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t-statistik untuk pengaruh *leverage* terhadap opini audit adalah 1,011. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai t tabel pada level signifikansi 5 persen yaitu 1,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. P value untuk pengaruh *leverage* terhadap opini audit sebesar 0,312 lebih besar dibandingkan nilai alpha 0,05. Hal ini berarti hubungan antara *leverage* terhadap opini audit tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien parameter *leverage* terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,090 dengan arah positif. Artinya semakin besar *leverage* maka akan opini audit semakin kecil.

Berdasarkan konsep *signalling theory*, pemerintah daerah akan memberikan sinyal-sinyal terkait kesanggupan untuk mengembalikan dana yang dipinjam dengan mengungkapkan informasi keuangan melalui *website* pemerintah daerah. Informasi keuangan yang dipublikasikan harus memiliki kualitas yang baik yang dibuktikan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan konsep *signalling theory*. Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi justru tidak mempublikasikan informasi keuangan di website resminya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan *leverage* tinggi dianggap memiliki kinerja yang buruk sehingga pemerintah daerah cenderung tidak mengungkapkan informasi keuangan agar tidak menjadi sorotan kreditur. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum sepenuhnya terbuka kepada pihak eksternal seperti kreditur. Hal ini bertolak belakang dengan konsep *stewardship theory*. Pemerintah daerah sebagai *steward* seharusnya lebih terbuka kepada masyarakat karena tujuan utama pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kinerja pemerintah.

Opini audit yang diperoleh pemerintah daerah tidak mampu mendorong pemerintah daerah dengan *leverage* tinggi untuk mengungkapkan informasi keuangan pada website karena seiring dengan banyaknya bermunculan kasus korupsi meskipun pemerintah daerah telah memperoleh



opini WTP menjadikan opini audit tidak lagi mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, opini audit tidak dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dengan *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah di Indonesia.

Hipotesis keenam menyebutkan bahwa semakin baik kinerja keuangan, semakin baik pula opini audit pada Pemerintah Daerah di Indonesia bagian tengah. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t-statistik untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap opini audit adalah 3,010. Nilai ini lebih besar dibandingkan nilai t tabel pada level signifikansi 5 persen yaitu 1,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. *P value* untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,003 lebih kecil dibandingkan nilai alpha 0,05. Hal ini berarti hubungan antara kinerja keuangan terhadap opini audit signifikan, sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien parameter kinerja keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,308 dengan arah positif. Artinya semakin baik kinerja keuangan semakin baik pula opini audit.

Opini audit yang baik diperoleh dari kinerja pemerintahan yang baik dan merupakan gambaran dari pengelolaan keuangan daerah yang tertib oleh pemerintah. Oleh karena itu, opini audit yang wajar dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan dengan *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini menemukan hasil yang sebaliknya dimana opini audit tidak memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan *Internet Financial Reporting* secara signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hiola *et al.*, (2015) yang menemukan bahwa opini audit dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah di *website*. Pemerintah daerah dengan kinerja yang baik serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak serta merta mengungkapkan informasi keuangan pada website resminya. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan pemahaman pemerintah daerah akan pemanfaatan teknologi informasi seperti internet sebagai media transparansi informasi keuangan. Kota Denpasar dan Kabupaten Tangerang memiliki kinerja keuangan yang baik serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian akan tetapi keduanya memiliki tingkat pengungkapan yang berbeda.

Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP untuk LKPD Tahun 2017 mencapai 76 persen, yang berarti sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah menyajikan informasi secara wajar sesuai dengan SAP dan SAK dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, kinerja keuangan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia jika dilihat dari tingkat kemandirian daerah termasuk dalam kategori rendah sekali. Artinya, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat rendah. Pemerintah daerah masih bergantung kepada dana bantuan dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah cenderung tidak mengungkapkan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah meskipun memperoleh opini WTP atas Laporan.

Hipotesis ketujuh menyebutkan bahwa semakin tinggi opini audit, tidak memberikan dampak pada *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah di Indonesia bagian tengah. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai t-statistik untuk pengaruh opini audit terhadap *Internet Financial Reporting* adalah 0,741. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai t tabel pada level signifikansi 5 persen yaitu 1,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. *P value* untuk pengaruh opini audit terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,459 lebih besar

dibandingkan nilai alpha 0,05. Hal ini berarti hubungan antara opini audit terhadap *Internet Financial Reporting* tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien parameter *leverage* terhadap *Internet Financial Reporting* sebesar 0,064 dengan arah positif. Artinya semakin besar opini audit maka akan *Internet Financial Reporting* semakin kecil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran Pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*. Yogyakarta
- Andriani, Evanti. 2012. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Diani, Rosita Putri. 2016. Analisis Determinan Pelaporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Donaldson, L and Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Garcia, Ana Carcaba and J. G. Garcia. 2010. Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, Volume 36, Issue 5
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2015. *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Hiola, Y.R., dan Aji D.M. 2015. Political Environment in the Effect of the Regional Government Financial Performance on Disclosure of Financial Information on Website. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 19 (1) : 27-36.
- Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
- Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard & Oyelere, Peter, 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3 (2) : 87-101
- Prabowo, Daniel Wicaksono Adhi. 2016. Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD114) melalui internet (IFLGR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi* Volume XVI, No.1.
- Setyowati, Lilis. 2016. Determinan Yang mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6 (1) : 45-62.
- Sinaga, Yurisca F dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemda. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Solimun, 2012. Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi. Program Studi Statistika FMIPA. Universitas Brawijaya. Malang.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

———.2015. *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Trisnawati, M,D., & Achmad, K,. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram. Lombok

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.